

DETERMINAN PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)

Yoggi Setiawan

Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article History:

Received date

Revised date

Accepted date

Keywords:

1-5 keywords

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of the size of local government, population, per capita income, type of local government and audit opinion on the financial statement publication on the official website of the local government. In this study sample of 502 district / cities in Indonesia and the data is used as much as 190. The sample was selected using purposive sampling method. The analytical methods used are the logistic regression analysis. The variables tested in this study consisted of the size of local government, population, per capita income, type of local government and the audit opinion.

Based on the analysis result that the size of the local government and the audit opinion has a positive and significant impact on the financial statement publication on the official website of the local government. While the number of population, per capita income, and type of local government negatively affect the financial statement publication on the official website of the local government.

Keywords: size of local government, population, per capita income, type of local government and audit opinion. © 2016 JAI.

All rights reserved

PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU no. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan diberikannya wewenang yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, maka pengelolaan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Informasi merupakan salah satu hal yang paling banyak dicari oleh masyarakat khususnya informasi tentang pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat atas pengelolaan pemerintah daerah yang telah dilakukan selama ini.

Masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengatur daerahnya dan apakah pengelola melaksanakan tugas dan

amanat yang telah diberikan kepada mereka secara bertanggung jawab. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai kondisi daerah baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. Kualitas informasi pemerintah daerah yang dihasilkan ini penting menuju terwujudnya *good governance*. Menurut Rora Puspita dan Martani (2012), informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan pemda seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya. Hal ini didukung dengan adanya undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka serta

dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

Bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan Berdasarkan UU tersebut, pemerintah bisa memanfaatkan media internet untuk mempublikasikan informasi keuangan pemerintah daerah karena teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sudah semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapapun. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah berkembang begitu pesat yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi, sehingga menempatkan suatu negara pada kedudukan sejauh mana negara tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh negara itu menguasai bidang teknologi komunikasi dan informasi. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang hidup dalam lingkungan global, maka keterlibatan dalam kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi adalah hal yang sangat penting, khususnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia sendiri. Untuk mencapai maksud tersebut pemerintah menuangkannya dalam salah satu bentuk dari tujuan dan arah Pembangunan Nasional, yaitu sektor/bidang ilmu pengetahuan teknologi.

Pemublikasian informasi keuangan melalui internet telah lebih dahulu dilakukan oleh perusahaan swasta agar dapat meningkatkan ketersediaan laporan informasi keuangan perusahaan bagi pengguna informasi secara cepat. Jika pemerintah juga menggunakan internet sebagai sarana pemublikasian informasi keuangan pemerintah daerah, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses dan mengetahui informasi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah yang melakukan pemublikasian informasi keuangan di *website* resmi pemerintah daerah itu menunjukkan bahwa pemerintah melakukan transparansi informasi keuangan kepada masyarakat.

Transparansi merupakan persyaratan akuntabilitas administratif kepada publik yang menjadi elemen kunci *governance*, berupa jaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintah termasuk pengelolaan keuangan publik (Medina, 2012). Suatu pemerintahan daerah dengan kepala daerah yang menjunjung

transparansi dapat dilihat dari ada atau tidaknya informasi keuangan yang tersedia secara terbuka bagi masyarakat dan pengguna lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, transparansi dapat menjadi indikator adanya kelola keuangan yang baik (Sinaga, 2011). Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting karena ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Salah satu bentuk transparansi informasi keuangan pemda berupa memublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah di internet agar informasi tersebut mudah dan cepat diakses oleh penggunanya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *e-Government*. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dieliminir melalui pemanfaatan *e-Government* menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. *E-Government* menawarkan pelayanan publik bisa diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. *E-Government* juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara *face-to-face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

Penggunaan internet di Indonesia akan sangat membantu menyukseskan program *e-Governance* dalam membangun sistem informasi keuangan daerah. Internet menjadi teknologi yang berperan dalam proses penyediaan dan transfer informasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan kepada pihak lain, misalnya warga masyarakat, ataupun sebaliknya. Pemanfaatan internet dalam suatu institusi dapat membuat pekerjaan semakin efektif dan efisien (Medina, 2012). Menyadari akan besarnya manfaat *e-Government*, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan dalam

bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang penerapan *e-Government*. Salah satu media yang sangat mudah digunakan untuk penyebarluasan informasi kegiatan pemda ini adalah melalui *website* resmi pemda. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) juga telah mengeluarkan panduan penyelenggaraan *website* pemda dan *blueprint* implementasi aplikasi *e-Government* pemda di Indonesia. Kemudian peraturan lebih lanjut melalui peraturan Menkominfo No. 26 tahun 2006 tentang penggunaan nama domain *go.id* untuk *website* resmi pemerintah pusat maupun daerah.

Banyak pemerintah daerah yang belum menggunakan *website* secara optimal baik dari segi informasi keuangannya maupun non keuangan. Adapun beberapa pemda yang sudah memanfaatkan *website* namun sangat jarang dilakukannya publikasi informasi keuangan dalam *website* tersebut, yang terjadi hanya pengungkapan mengenai Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) saja yang banyak diungkap tetapi jarang untuk sampai laporan keuangannya, sedangkan tanggung jawab pemerintah daerah sangat besar dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak.

Penelitian terkait dengan pengungkapan informasi di sektor pemerintah daerah masih jarang diteliti dikarenakan sulit untuk mendapatkan data berbeda dengan di sektor privat dimana sudah sering dilakukannya penelitian tentang pengungkapan baik *mandatory disclosure* maupun *voluntary disclosure*. Apa yang terjadi dipemerintahan Indonesia sekarang sangatlah kompleks karena hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia sudah tidak percaya dengan pemerintah karena berbagai macam hal yang terjadi di Indonesia seperti korupsi.

Adanya aturan dan dukungan pemerintah pusat untuk mengembangkan *website* pemda dan meningkatnya kebutuhan publik akan transparansi, sudah semestinya pemerintah daerah semakin sering menggunakan *website* resminya sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. Namun, pemerintah daerah di Indonesia dalam penggunaan *websitenya* banyak yang belum

maksimal serta banyak pemerintah daerah yang belum mengungkapkan informasi laporan keuangan pemerintah daerahnya.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis (Donaldson & Davis, 1989, 1991 dalam Raharjo, 2007). Teori *Stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana pemerintah sebagai *Steward* tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan *principal* sebagai masyarakat (Raharjo, 2007). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *Stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Stewardship* dimana pemerintah sebagai *Steward* dan masyarakat sebagai *principal*. *Steward* menjalankan tugasnya untuk kepentingan organisasi bukan kepentingan pribadi, sehingga dalam melakukan publikasi informasi keuangan dan non-keuangan di *website* resmi pemerintah daerah merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atas amanah yang telah diberikan kepada *steward*.

2. Pemerintah Daerah

Menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. NKRI terbagi atas daerah-daerah provinsi dan Provinsi terbagi atas kota dan kabupaten yang mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang (Yurisca 2011).

Pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan yang lebih kecil dari suatu Negara dan hanya beroperasi melalui kuasa yang diberikan dari undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Pada pemerintahan masyarakat primitif, tingkat pemerintah daerah terendah adalah kepala desa atau kepala suku.

3. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan akuntabilitas maka menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada publik (Mahsun, dkk, 2006). Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang

menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari pemungutan pajak maupun retribusi untuk membandingkan temuan-temuan audit dengan kriteria yang ditetapkan atau hasil yang tercantum dalam laporan keuangan (I Gusti, 2008).

Menurut I Gusti (2008) terdapat tiga pihak yang saling berkaitan dengan kegiatan audit yaitu entitas pemeriksa (auditor), entitas yang diaudit (*auditee*), dan entitas yang meminta pertanggungjawaban. Entitas pemeriksa adalah pihak yang mengaudit akuntabilitas pihak entitas yang diaudit. Entitas pemeriksa dalam pemerintahan daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Entitas yang diaudit adalah pihak yang melaporkan tanggungjawabnya kepada entitas yang meminta pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya diperiksa oleh BPK. Entitas yang diaudit dalam pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah. Entitas yang meminta pertanggungjawaban adalah pihak yang meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah atas kinerjanya berdasarkan hasil audit laporan keuangan oleh BPK. Entitas yang meminta pertanggungjawaban atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi yang sama, dewan direksi, pemangku kepentingan (*stakeholder*), parlemen, masyarakat, pers, atau investor.

Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melaporkan pertanggungjawabannya kepada pihak eksternal. Untuk menjamin keandalan dari akuntabilitas pemerintah daerah dibutuhkan pihak independensi untuk memberikan atestasi atas informasi dengan melakukan audit.

Hasil audit oleh BPK dilaporkan dalam bentuk laporan audit. Laporan audit harus mencakup pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan, hasil pemeriksaan berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi, tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan,

dan pelaporan informasi rahasia bila ada. Simpulan dan rekomendasi audit akan membawa dampak yang luas bagi entitas yang diaudit dan *stakeholder* (I Gusti, 2008).

5. Pelaporan Keuangan di Internet

Pelaporan keuangan melalui internet merupakan salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada *stakeholder* dengan biaya yang relatif rendah, akses cepat dan mudah. Namun tidak semua pemerintah daerah dengan sukarela melaporkan informasi keuangannya melalui internet. Terdapat variasi pemerintah daerah dalam melaporkan informasi keuangannya di internet, dimana terdapat pemerintah daerah yang melaporkan informasi keuangannya secara lengkap dan ada pula yang melaporkannya secara tidak lengkap (sedikit) (Dian, 2013).

Ukuran Pemda Berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan di Situs Resmi Pemerintah Daerah.

Penelitian Trisnawati dan Achmad (2014), ukuran pemerintah daerah terbukti berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Hasil ini juga didukung dengan penelitian Puspita dan Martani (2012). Karena pemda yang besar memiliki pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, sehingga pemda akan mendapatkan pengawasan yang besar dan semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Sedangkan hasil penelitian Sinaga (2011), ukuran pemda terbukti tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan di internet.

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah maka pemda akan lebih terdorong untuk melakukan transparansi informasi keuangan yang dialokasikan untuk menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu untuk mempermudah dalam melakukan proses publikasi informasi keuangan dan non keuangan pemerintah daerah dapat

menggunakan situs resmi pemerintah. Dari uraian diatas maka dapat di simpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah

Jumlah Penduduk Berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan di Situs Resmi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Penelitian Hilmi dan Martani (2009), bahwa jumlah penduduk berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan. Sedangkan, hasil penelitian Andriani (2015), bahwa variabel Jumlah Penduduk (*Size of the Public*) tidak terbukti signifikan mempengaruhi tingkat Pengungkapan informasi non keuangan dalam website Pemda. Hal ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Aditya. Dkk (2013) tentang *Determinant Internet Financial Local Reporting in Indonesia*, bahwa *Size* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan.

Jumlah penduduk yang banyak akan lebih mendorong pemerintah untuk melakukan publikasi laporan keuangan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedikit, karena penduduk yang banyak lebih cenderung membutuhkan informasi keuangan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan pengambilan keputusan dalam berinvestasi di daerah tersebut. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah

Pendapatan Perkapita Berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan di Situs Resmi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian Hudoyo dan Mahmud (2014), pendapatan perkapita menunjukkan hasil yang positif terhadap publikasi laporan keuangan di *website* pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian Medina (2012) pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh terhadap informasi keuangan di *website* pemerintah daerah.

Tingkat kesejahteraan yang baik disuatu daerah masyarakatnya cenderung

memiliki pola pikir yang lebih maju, berbeda dengan masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah ataupun yang daerahnya tertinggal, masyarakat yang memiliki pola pikir yang lebih maju cenderung mengikuti perkembangan teknologi. Berdasarkan tingginya tingkat kesejahteraan disuatu daerah maka akan semakin mendorong pemerintah daerah untuk melakukan publikasi informasi keuangan, agar masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan maka pemda dapat menggunakan sarana internet untuk mempublikasikan informasi tersebut. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah

Tipe Pemerintah Daerah Berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan di Situs Resmi Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Achmad (2014) menunjukkan tipe pemerintah daerah mengindikasikan bahwa keputusan pemda untuk melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet tidak dipengaruhi oleh tipe pemda tersebut. Hasil ini juga didukung dengan hasil penelitian Aditya. Dkk (2013). Sedangkan hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011), menunjukkan bahwa tipe pemda memiliki pengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan pemda melalui internet.

Daerah perkotaan merupakan daerah tujuan urbanisasi di mana kecenderungan masyarakatnya yang heterogen juga lebih tinggi. Berbagai macam kebudayaan, pekerjaan, tingkat pendidikan, serta tingkat kekayaan yang berimplikasi terhadap kecenderungan masyarakat perkotaan dalam mengakses internet cenderung lebih tinggi. Kecenderungan ini membuat pengawasan di daerah kota akan lebih tinggi, sehingga kecenderungan pemerintahan untuk secara sukarela melaporkan keuangan mereka juga lebih tinggi karena adanya tuntutan transparansi keuangan (Aditya. Dkk, 2013). Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah.

Opini Audit Berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan di Situs Resmi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) menunjukkan bahwa penelitiannya gagal membuktikan adanya pengaruh opini audit terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Hasil ini didukung dengan penelitian Heriningsih dan Ruserlistyani (2013), Sebagian besar pemerintah daerah baik yang mendapatkan opini wajar maupun yang tidak wajar sekalipun, cenderung sama dalam mengungkapkan laporan keuangannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Suatu pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seharusnya akan cenderung mengungkapkan laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah karena dengan adanya opini tersebut akan lebih mendorong pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangannya agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah daerah melalui laporan keuangan tersebut. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H5: Opini audit berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah *Website* Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui situs resmi tahun 2013 sedangkan subjek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemda kabupaten/kota di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Adapun data yang akan digunakan memiliki kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriterian sampel sebagai berikut :

1. Laporan keuangan yang dipublikasi telah di audit oleh BPK untuk tahun 2013.
2. Pemerintah memiliki *website* resmi dan dapat diakses.
3. Hasil pemeriksaan oleh BPK

menunjukkan opini WTP dan WDP.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung karena sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder tersebut berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari badan pemeriksa keuangan (BPK) serta data jumlah penduduk diperoleh dari badan pusat statistik (BPS).

Data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah yang terdapat pada badan pemeriksa keuangan dan melakukan survey terhadap masing-masing situs resmi pemerintah daerah untuk mengumpulkan data yang akan mendukung variabel dependen.

Definisi Operasional Variabel Penelitian Publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah

Variabel dependen ini menjelaskan tentang tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan kualitas informasi yang disajikan dalam situs resmi pemda dalam hal pengungkapan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam situs resmi pemda, sehingga informasi tersebut dapat digunakan secara baik oleh para pengakses situs resmi pemda.

Dalam penelitian Sinaga (2011) variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, begitu juga dalam penelitian Sari (2014). Jika didalam publikasi informasi keuangan pemerintahan menyediakan APBD, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), LKPD sendiri terdiri dari empat komponen, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersedia dalam situs resmi pemda, maka akan diberi nilai 1 (satu), akan tetapi jika salah satu dari

komponen diatas tidak tersedia maka nilainya 0 (nol).

Ukuran Pemerintah

Ukuran pemda digambarkan dengan seberapa besar aset yang dimiliki oleh pemda (Sinaga, 2011). Sumber data adalah LKPD pemda yang telah diaudit periode 2013. Puspita dan Martani (2012) juga menggunakan total aset sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat publikasi informasi keuangan di *website* pemerintah daerah. Ukuran pemerintah dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi besarnya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintah. Suatu daerah yang memiliki banyaknya penduduk didominasi dengan daerah perkotaan. Kompleksitas ini tidak menghambat tingkat pengungkapan tetapi akan mendorong untuk melakukan publikasi kepada masyarakat. Hilmi dan Martani (2009) dalam mengukur variabel jumlah penduduk menggunakan total jumlah penduduk didaerah tersebut. Oleh karena itu jumlah penduduk di Log Natural.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan sebuah indikator perekonomian suatu pemerintah baik dalam skala nasional maupun skala daerah. Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah (Hudoyo dan Mahmud, 2014). Pendapatan perkapita dapat diukur dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

$$\text{Pendapatan Per kapita} = \frac{\text{PDRB tahun } t}{\text{Penduduk daerah dalam tahun } t}$$

Tipe Pemerintah Daerah

Laswad dkk., (2005) menyebutkan bahwa tingkat pengungkapan secara sukarela di internet pada daerah kabupaten masih kurang jika dibandingkan dengan daerah kota. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala nominal sebagai mana

yang dilakukan pada penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) mengukur variabel tipe pemerintah dengan skala nominal dimana pemerintah kota diberi nilai 1 (satu) dan pemerintah kabupaten diberi nilai 0 (nol).

Opini Audit

Opini audit merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemda yang mendapat opini WTP akan cenderung melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet untuk menunjukkan sinyal kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Trisnawati dan Achmad, 2014). Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala nominal sebagai mana yang dilakukan pada penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) Angka 1 untuk pemda yang mendapat opini audit WTP dan angka 0 untuk pemda yang mendapat opini audit non WTP.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini ialah regresi logistik (*Logistic Regression*). Metode ini dipilih karena variabel dependen bersifat kategorikal atau nominal, dan variabel independen berupa kombinasi data rasio dan nominal. Model penelitian ini bertujuan untuk menguji pemerintah daerah yang melakukan publikasian informasi keuangan pemda melalui internet. berdasarkan rumusan masah dan kerangka pemikiran yangtelah diuraikan sebelumnya, Model regresi logistik yang digunakan adalah :

$$DWEB = \alpha + \beta_1 \text{ukuran pemda} + \beta_2 \text{jumlah penduduk} + \beta_3 \text{pendapatan perkapita} + \beta_4 \text{tipe pemda} + \beta_5 \text{opini audit} + e$$

$DWEB = \text{Dummy Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet}$

$\alpha = \text{konstanta}$

$\beta = \text{Slope atau Koefisien Regresi}$

ukuran pemda = Ln total aset

jumlah penduduk= Ln total jumlah penduduk

pendapatan perkapita =tingkat kesejahteraan masyarakat

tipe pemerintah= *Dummy*

opini audit= *Dummy*

$e = \text{error}$

Pengujian yang dilakukan dalam model regresi logistik meliputi Uji Multikolinearitas, Uji Nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$, *Hosmer and Lemeshow Test*, Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*), *Omnibus Test of Model Coefficients*, dan Uji Koefisien Regresi.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

3. Multikolienaritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antar variabel independennya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki *website* resmi pada periode penggunaan 2015 serta laporan keuangan 2013 yang telah diaudit. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, jumlah sampel yang memenuhi kriteria diperoleh 313 pemerintah daerah dari 502 pemerintah daerah.

Berdasarkan klasifikasi tabel 4.1, diperoleh jumlah pemerintah daerah kabupaten dan kota tahun 2013 sebanyak 502 kabupaten dan kota. Setelah dilakukannya pemilihan yang memenuhi kriteria sampel yang dapat diolah sebanyak 313 pemerintah kabupaten dan kota. Setelah melakukan pengujian analisis data terdeteksi 123 sampel yang bias sehingga

sampel tersebut harus dibuang, oleh karena itu data yang diolah dengan menggunakan model regresi dalam penelitian sebanyak 190 data.

B. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi yang disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 menunjukkan variabel UP (Ukuran Pemerintah) memiliki nilai minimum sebesar 27,69, nilai maksimum sebesar 28,94 dan nilai rata-rata sebesar 28,3170 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,29231. Dimana variabel UP memiliki nilai tertinggi diantara nilai lainnya. Variabel JP (Jumlah Penduduk) memiliki nilai minimum sebesar 11,49, nilai maksimum sebesar 14,28 dan nilai rata-rata sebesar 12,8915 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,67467.

Variabel PP (Pendapatan Perkapita) memiliki nilai minimum sebesar 8,84, nilai maksimum sebesar 10,37 dan nilai rata-rata sebesar 9,6231 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,38101. Variabel PP menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

C. Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat korelasi antar variabel independen nya. Untuk menguji hal tersebut maka dilakukan uji multikolinieritas yang bertujuan untuk menguji apakah ditemukan korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi.

Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen karena tidak ada nilai yang melebihi angka 0,90 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinieritas antara variabel independen dalam penelitian ini.

D. Uji Kualitas Data

1. Uji Nilai -2 Log Likelihood

Berdasarkan hasil pada tabel 4.4 pengujian *Hosmer and Lemeshow Test* ditemukan bahwa nilai *Chi-square* sebesar 8,026 dengan nilai sig sebesar 0,431. Dari hasil tersebut didapat bahwa nilai sig sebesar $0,431 > \alpha$ (0,05) maka disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk melanjutkan pengujian dalam penelitian ini.

2. Menilai Overall Model Fit

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, menunjukkan bahwa nilai -2LL awal sebesar 262,047 sedangkan nilai -2LL akhir memiliki nilai sebesar 249,173 penurunan nilai -2LL ini menunjukkan model regresi lebih baik atau model regresi fit dengan data.

3. Menguji Koefisien Determinan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,088 atau 8,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah (DWEB) dapat dijelaskan sebesar 8,8% oleh variabel independen yaitu ukuran pemerintah (UP), jumlah penduduk (JP), pendapatan perkapita (PP), tipe pemerintahan (TP) dan opini audit (OP) sedangkan sisanya sebesar 91,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Tabel Klasifikasi

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, kekuatan model untuk memprediksi kemungkinan adanya laporan keuangan pemerintah daerah di situs resmi pemerintah daerah adalah 46%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan regresi ini terdapat 40 pemerintah daerah yang diprediksi menyajikan laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah dari total 87 pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan kekuatan model untuk memprediksi

tidak adanya laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 70,9% yang berarti bahwa dengan model regresi ini terdapat 73 pemerintah daerah yang diprediksi tidak melaporkan laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah dari total 103 pemerintah daerah yang tidak menyajikan laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah.

E. Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

1. Persamaan Regresi Logistik

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.8 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$DWEB = -38,122 + 1,217 (UP) - 0,110 (JP) + 0,494 (PP) - 0,614 (TP) + 0,805 (OP) + e$$

Hasil pengujian hipotesis 1 (H1)

Dari hasil pengujian pada tabel 4.8 terlihat bahwa variabel ukuran pemerintah daerah terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah yang menggunakan perhitungan *Natural Logaritma* total aset, memiliki nilai signifikansi (0,047) $< \alpha$ (0,05) dengan nilai koefisien positif (1,217). Dengan demikian variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Hasil pengujian hipotesis 2 (H2)

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa variabel jumlah penduduk terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah yang menggunakan perhitungan *Natural Logaritma* jumlah penduduk, memiliki nilai signifikansi (0,174) $> \alpha$ (0,05) dengan nilai koefisien negatif (-0,110). Dengan demikian variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis 3 (H3)

Berdasarkan tabel 4.8, variabel pendapatan perkapita terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah yang diprosikan dengan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk didaerah tersebut, memiliki nilai signifikansi (0,254) $> \alpha$ (0,05) dengan nilai koefisien positif (0,494). Dengan demikian variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis 4 (H4)

Berdasarkan tabel 4.8, variabel tipe pemerintah daerah terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah, memiliki nilai signifikansi (0,203) $> \alpha$ (0,05) dengan nilai koefisien negatif (-0,614). Dengan demikian variabel tipe pemerintahan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.

Hasil Pengujian hipotesis 5 (H5)

Berdasarkan tabel 4.8, variabel opini audit terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah, memiliki nilai signifikansi (0,017) $< \alpha$ (0,05) dengan nilai koefisien positif (0,805). Dengan demikian variabel opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima.

F. Pembahasan

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Publikasi Laporan Keuangan di Situs Resmi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah dengan arah koefisien yang menunjukkan nilai positif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) dan Puspita dan Martani (2012). Pemerintah yang besar memiliki pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar dan semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi mengingat kebutuhan pengawasan dan pelaporan yang lebih besar oleh pemda yang berukuran besar, maka diharapkan pemda dapat mengadopsi metode pelaporan yang paling efektif internet dianggap sebagai media yang paling efektif dan efisien bagi pemerintah dalam pelaksanaan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Publikasi Laporan Keuangan di Situs Resmi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian variabel jumlah penduduk daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2015) dan Aditya. Dkk (2013) yang diketahui bahwa variabel Jumlah Penduduk (*Size of the Public*) tidak terbukti

signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam situs Pemda. Banyak ataupun sedikit jumlah penduduk disuatu daerah tidak mendorong suatu pemerintahan untuk melakukan publikasian laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah, karena banyak atau sedikitnya penduduk disuatu daerah tanpa diikuti dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif maka akan mempengaruhi pola pikir penduduk tersebut, serta kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Apabila didalam suatu daerah SDM nya tidak memiliki kualitas yang baik dan kepedulian mereka akan kinerja pemerintah daerahnya rendah maka permintaan atas laporan keuangan rendah. Hal ini tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan publikasi laporan keuangan disitus resmi pemerintah daerah.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2009) bahwa Jumlah penduduk berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

3. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Publikasi Laporan Keuangan di Situs Resmi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian variabel pendapatan perkapita menunjukkan pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah. Karena masih banyaknya daerah di Indonesia yang memiliki nilai pendapatan perkapita rendah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun rendah. Hal tersebut berpengaruh terhadap pola

pikir masyarakatnya. Apabila didalam suatu daerah tingkat kesejahteraannya rendah maka akan berpengaruh terhadap pola pikir masyarakatnya yang masih belum berkembang, kepedulian mereka akan kinerja pemerintah pun rendah maka permintaan atas laporan keuangan sedikit, hal ini membuat pemerintah daerah tidak terdorong untuk mempublikasikan laporan keuangannya di situs resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Hudoyo dan Mahmud (2014), pendapatan perkapita menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan penelitian ini sejalan dengan penelitian Medina (2012) pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah.

4. Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan di Situs Resmi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini variabel tipe pemerintahan menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini dikarenakan penggunaan internet sudah mencapai keseluruhan Indonesia, sehingga masyarakat kota maupun kabupaten memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses informasi melalui internet, yang menyebabkan pemerintah dan kabupaten tidak memiliki perbedaan dalam melakukan pempublikasian laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) dan Aditya, Dkk (2013), yang mengatakan bahwa tipe pemerintah tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pemerintah kota ataupun kabupaten dalam pelaporan

keuangan di internet. Akan tetapi hasil ini tidak didukung oleh penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) bahwa tipe pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap informasi keuangan pemda melalui internet.

5. Pengaruh Opini Audit terhadap Publikasi Laporan Keuangan di Situs Resmi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel opini audit memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Hasil ini didukung dengan penelitian Heriningsih dan Ruserlistyani (2013), Sebagian besar pemerintah daerah baik yang mendapatkan opini wajar maupun yang tidak wajar sekalipun, cenderung sama dalam mengungkapkan laporan keuangannya dalam LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Suatu pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seharusnya akan cenderung mengungkapkan laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah karena dengan adanya opini tersebut akan lebih mendorong pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangannya agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah daerah melalui laporan keuangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) menunjukkan bahwa penelitiannya gagal membuktikan adanya pengaruh opini audit terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet.

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah, jumlah penduduk, pendapatan perkapita,

tipe pemerintah, opini audit terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan sampel berupa pemerintah daerah kabupaten dan kota yang melakukan publikasi laporan keuangan di *website* pemerintah untuk tahun 2013 yang telah memenuhi kriteria dalam melakukan penelitian ini, sehingga jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 190 kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi logistik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah dengan arah koefisien yang menunjukkan nilai positif. Pada dasarnya pemerintah yang besar memiliki pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar dan semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi mengingat kebutuhan pengawasan dan pelaporan yang lebih besar oleh pemda yang berukuran besar, maka diharapkan pemda dapat mengadopsi metode pelaporan yang paling efektif internet dianggap sebagai media yang paling efektif dan efisien bagi pemerintah dalam pelaksanaan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Jumlah penduduk daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Banyak ataupun sedikit jumlah penduduk disuatu daerah tidak mendorong suatu pemerintahan untuk melakukan pempublikasian laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah.
3. Pendapatan perkapita menunjukkan pengaruh positif akan tetapi tidak

signifikan terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat didaerah tersebut sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pola pikir masyarakatnya.

4. Tipe pemerintahan menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini dikarenakan penggunaan internet sudah mencapai keseluruhan Indonesia, sehingga masyarakat kota maupun kabupaten memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses informasi melalui internet, yang menyebabkan pemerintah dan kabupaten tidak memiliki perbedaan dalam melakukan pempublikasian laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah.
5. Opini audit memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Sebagian besar pemerintah daerah baik yang mendapatkan opini wajar maupun yang tidak wajar sekalipun, cenderung sama dalam mengungkapkan laporan keuangannya dalam LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Suatu pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seharusnya akan cenderung mengungkapkan laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah karena dengan adanya opini tersebut akan lebih mendorong pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangannya agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah daerah melalui laporan keuangan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah

yang disajikan di dalam situs resmi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah dirahapkan selalu *mengupdate* sehingga dapat memperlihatkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan membuktikan bahwa prinsip transparasi dan akuntabilitas telah dilakukan.

2. Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang lebih berpotensi untuk mempengaruhi publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah, seperti tingkat pendidikan, tingkat investasi, rasio kemandirian. Dapat juga mempertimbangkan untuk mengembangkan indeks pengungkapan informasi keuangan untuk pelaporan keuangan di internet dengan memberi *scoring* sesuai banyaknya informasi keuangan untuk menilai pelaporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah.

C. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah di ukur dengan menggunakan *dummy* tanpa memperhatikan seberapa banyak laporan keuangan yang disajikan, sehingga belum menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pelaporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah.
2. Kemampuan variabel yang diteliti dalam menjelaskan publikasi laporan keuangan pemda melalui internet dalam penelitian ini masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan publikasi laporan keuangan melalui situs resmi pemerintah daerah.

3. Jangka waktu penelitian yang hanya mengambil periode observasi selama 1 tahun. Dikarenakan data terlalu banyak yang bias sehingga sampel yang dapat digunakan 190 dari 313 data, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan.
4. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahun 2013 yang telah di audit oleh BPK, hal ini dikarenakan laporan keuangan pemerintah daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yang terbaru masih belum tersedia lengkap di BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, Rahmad Dian. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi FEB UNDIP*, Semarang.
- Andriani, Yelvina. 2015. Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera. *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Handayani, Sri. 2010. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VII, No. 2, Tahun 2010*. STIA LAN Jakarta.
- Herningsih, Suchyo dan Ruserlistyani. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 13. Nomor 02*.

- Hilmi, Amirudin Zul dan Dwi Martani. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkatpengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional akuntansi*.
- Hudoyo, Yacoeb Triandy dan Amir Mahmud. 2014. Fakto-Faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*.
- Laswad, F., et all. 2005. "Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities". *Journal of Accounting and Public Policy*. 24. 101-121.
- Liestiani, A. (2008). Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006. *Skripsi FEUI*.
- Mahsun, Mohammad, dkk . 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Medina, Febri. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Puspita, Rora. Dwi, Martani. (2012). Analisis pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi 15*, Banjarmasin.
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi Vol. 2 No. 1 Juni 2007* : 37-46.
- Rahman, A., dkk. 2013. "Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi*. 1(26). 1299-1323.
- Rai, A. I Gusti. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ratmono, Dwi. 2013. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi*. 1(2). 28-48.
- Sari, dwi maya. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi*. FE UMY program akuntansi.
- Sinaga, Y. B. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sinaga, Yurisca F dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Diponegoro*. <http://eprints.undip.ac.id/>. (Diakses tanggal 30 Desember 2015).
- Trisnawati, Mya Dewi dan Komarudin Achmad. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintahdaerah Melalui Internet. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, Lombok.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*.
- _____. *Peraturan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Website Resmi Pemerintah Pusat Maupun Daerah*.

- _____. *Instruksi Presiden Republik Indonesia*
Nomor 3 Tahun 2003 Tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government.

- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia*
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia.*
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN

Tabel 4.2

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Variance
LN_UP	190	27,69	28,94	28,3170	,29231	,085
LN_JP	190	11,49	14,28	12,8915	,67467	,455
LN_PP	190	8,84	10,37	9,6231	,38101	,145
Valid N (listwise)	190					

Tabel 4.3

**Uji Multikolinieritas
Correlation Matrix**

	Constant	LN_UP	LN_JP	LN_PP	TP	OP
Step Constant	1,000	-,943	,295	-,135	,126	-,024
1 LN_UP	-,943	1,000	-,504	-,146	-,068	,000
LN_JP	,295	-,504	1,000	,154	,138	,006
LN_PP	-,135	-,146	,154	1,000	-,323	,069
TP	,126	-,068	,138	-,323	1,000	-,147
OP	-,024	,000	,006	,069	-,147	1,000

Tabel 4.4

Pengujian Kelayakan Model

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8,026	8	,431

Tabel 4.5

Pengujian Keseluruhan Model

-2LL awal (Block Number = 0)	262,047
-2LL akhir (Block Number =1)	249,173

Tabel 4.6

**Uji Koefisien Determinasi
Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	249,173 ^a	,066	,088

Tabel 4.7
Tabel Klasifikasi
Classification Table^a

Observed	Predicted		
	DWEB		Percentage Correct
	Tidak mengungkapkan di website	mengungkapkan di website	
DWEB Tidak mengungkapkan di website	73	30	70,9
mengungkapkan di website	47	40	46,0
Overall Percentage			59,5

Tabel 4.8
Hasil Uji Hipotesis
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
LN_UP	1,217	,612	3,957	1	,047	3,377
LN_JP	-,110	,263	,174	1	,677	,896
LN_PP	,494	,433	1,301	1	,254	1,639
TP	-,614	,482	1,623	1	,203	,541
OP	,805	,338	5,669	1	,017	2,236
Constant	-38,122	15,905	5,745	1	,017	,000